



**LAPORAN KUNJUNGAN SPESIFIK KOMISI II DPR – RI
KE PROVINSI SUMATERA UTARA
PADA MASA PERSIDANGAN III TAHUN SIDANG 2017 – 2018
TANGGAL 22 JANUARI 2018**

.....

I

I

II

II

II

II

II

II

II

II

II

I

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
JAKARTA**

LAPORAN KUNJUNGAN SPESIFIK KOMISI II DPR – RI
KE PROVINSI SUMATERA UTARA
PADA MASA PERSIDANGAN III TAHUN SIDANG 2017 – 2018
TANGGAL 22 JANUARI 2018

.....

I. PENDAHULUAN

A. DASAR KUNJUNGAN SPESIFIK

Komisi II DPR RI telah melakukan kunjungan spesifik ke Kantor Gubernur Provinsi Sumatera Utara dilakukan sebagai salah satu langkah pengawasan Komisi II DPR RI terkait kesiapan pilkada serentak yang akan diselenggarakan pada tanggal 27 Juni 2018.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak gelombang ketiga pada 27 Juni 2018. Pilkada diikuti 171 daerah dari tingkat provinsi, kabupaten, dan kota. Daerah yang akan menyelenggarakan pilkada tersebut terdiri atas 17 provinsi dan 154 kabupaten/kota. Provinsi Sumatera Utara akan menyelenggarakan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten 7 kabupaten yaitu: Kabupaten Padang Lawas, Kabupaten Padang Lawas Utara, Kabupaten Batu Bara, Kabupaten Langkat, Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Tapanuli Utara, Kabupaten Dairi serta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota di Kota Padang Sidempuan.

Penyelenggaraan pilkada yang dilakukan secara serentak harus diimbangi dengan kesiapan setiap daerah untuk melaksanakan pilkada serta koordinasi yang terus menerus antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah terkait pencairan dana pilkada, pelaksanaan setiap tahapan pilkada seperti pemutakhiran data pemilih, pencalonan, kampanye, dan sosialisasi, hingga koordinasi dengan aparat keamanan guna mendeteksi secara dini setiap potensi ancaman keamanan, pemungutan dan penghitungan suara, rekapitulasi penghitungan suara dan penetapan calon.

Tim kunjungan Komisi II DPR RI ke Provinsi Sumatera Utara berjumlah 13 orang Anggota. Tim kunjungan kerja didampingi oleh 1 (satu) tenaga ahli dan 3 (tiga) staf dari Sekretariat Komisi II DPR RI, dan 1 (satu) reporter dari TV parlemen DPR RI.

B. WAKTU KUNJUNGAN SPESIFIK

Kunjungan spesifik dilaksanakan pada tanggal 22 s/d 24 Januari 2015. Komisi II DPR RI telah melakukan kunjungan spesifik ke Kantor Gubernur Provinsi Sumatera Utara dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi dewan, dibidang pengawasan.

II. HASIL KUNJUNGAN

a. Sambutan Gubernur Sumatera Utara

Sesuai ketentuan pasal 201 ayat (4) Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No.1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi undang-undang menyatakan bahwa: pemungutan suara serentak dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota yang masa jabatannya berakhir pada tahun 2018 dan tahun 2019 dilaksanakan pada tanggal dan bulan yang sama pada bulan juni tahun 2018.

Terkait ketentuan yang dimaksud, pilkada serentak di Provinsi Sumatera Utara terdiri dari: Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Padang Lawas, Kabupaten Padang Lawas Utara, Kabupaten Batu Bara, Kabupaten Langkat, Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Tapanuli Utara, Kabupaten Dairi serta Kota Padang Sidempuan. Jumlah penduduk di Provinsi Sumatera Utara pada semester I tahun 2017 adalah 14.725.093 jiwa. Jumlah penduduk terkini yaitu 15.725.000.000 juta jiwa, sebanyak 2.300.000 jiwa yang terdata belum melakukan perekaman e-KTP. Namun Pemerintah Provinsi Sumatera Utara berkomitmen pada saat batas akhir perekaman e-KTP pada tanggal 14 April 2018 dipastikan perekaman e-KTP terpenuhi 97%.

Terkait dengan pelaksanaan pilkada serentak dimaksud, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara telah melakukan koordinasi dan fasilitasi dengan 8 kabupaten/kota untuk menyepakati pendanaan bersama pilkada serentak. Kesepakatan bersama pendanaan pilkada serentak telah ditandatangani oleh Gubernur Sumatera Utara dengan 8 bupati/walikota pada tanggal 18 April 2017. Menindaklanjuti kesepakatan bersama pendanaan pilkada serentak, khusus untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara telah melakukan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dengan KPU dan Bawaslu Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 31 Juli 2017.

Adapun jumlah dana pilkada gubernur/wakil gubernur untuk KPU Provinsi Sumatera Utara sesuai dengan NPHD yang telah ditandatangani sejumlah RP 855.940.086.000,- sedangkan jumlah dana pilkada gubernur/wakil gubernur untuk Bawaslu Provinsi Sumatera Utara sesuai dengan NPHD yang telah ditandatangani sejumlah Rp 273.820.692.000,- serta untuk biaya pengamanan (Polda Sumatera Utara) sebesar Rp 130.472.846.500,- Terkait biaya pelaksanaan pengamanan pilkada serentak 2018, Pemerintah Provinsi Sumatera utara telah melakukan studi banding ke Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur.

b. Pemaparan Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Utara

- Kesiapan Dana Hibah/Anggaran Penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota tahun 2018 di Provinsi Sumatera Utara memiliki anggaran pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur sebesar Rp 273.820.692.000,- dan pilkada sebesar Rp 90.154.669.000,-

No.	Prov/Kab/Kot	Jenis Pemilihan	Anggaran Disetujui	Tanggal	Nomor
1.	Provinsi Sumatera Utara	Pilgub	Rp 273.820.692.000	31 Juli 2017	No:270/6674/2017 No:3101/Bawaslu- Prov.SU/PR.03.00/07/2017
2.	Deli Serdang	Pilbup	Rp 20.339.415.000	12 September 2017	No: 270/3293 No: R.001/K.Panwaslu- DS/04/09/2017
3.	Dairi	Pilbup	Rp 9.120.329.000	13 September 2017	No: 23 tahun 2017 No: 003/Panwas- 03/PR.03.00/09/2017
4.	Batu Bara	Pilbup	Rp 8.516.595.000	18 September 2017	No:900/5934/2017 No: 008/Panwas- 02/PR.03.00/09/2017
5.	Tapanuli Utara	Pilbup	Rp 7.899.161.000	26 September 2017	No: 173/NPHD/TU/IX/2017 No: 06/Panwaslih- TU/IX/2017
6.	Langkat	Pilbup	Rp 16.469.250.000	18 September 2017	No:70/Panwas/2017 No: P.003/K.Panwas- 010/TU.00/09/2017

7.	Padang Lawas	Pilbup	Rp 10.706.510.000	20 September 2017	No: 270/216/MOU/2017 No: 006/Panwas/16/Pr.03.00/09/2017
8.	Padang Lawas Utara	Pilbup	Rp 10.913.449.000	3 Oktober 2017	No: 900/102/MOU/2017 No: B-20/K.Panwas-17/TU.03/10/2017
9.	Padangsidempuan	Pilwaktot	Rp 6.189.960.000	26 September 2017	No: 131/4314/2017 No: 808/Panwas-29/PR.03.00/09/2017
			Rp 363.975.361.000		

Perkembangan pencairan anggaran : pendanaan kegiatan telah ditampung dalam APBD Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk pilgub dan APBD Kab/Kota untuk pilkada di kab/kota. Pemotongan anggaran pilkada Padang Lawas sebesar Rp 1.7 milyar dan pilkada Padang Lawas Utara sebesar 2 milyar. Pemotongan anggaran pilkada dilakukan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu, oleh karena itu Bawaslu Provinsi Sumatera Utara telah menyurati Kementerian Keuangan sebagai langkah tindak lanjut mengatasi masalah ini.

- Pembentukan Panwas Pemilihan Kab/Kota, Panwascam, PPL, dan Kesekretariatan
 - a. Panwas kab/kota dibentuk pada bulan September 2017 di 33 kab/kota memiliki 99 panwas kab/kota
 - b. Panwas kecamatan dibentuk pada bulan Oktober 2017 terdapat 443 panwas kecamatan dan 1.329 panwascam
 - c. PPL di 33 kab/kota sejumlah 60.017 orang sudah dilantik dan telah melakukan pengawasan cokit.

Mekanisme pembentukan sesuai dengan undang-undang dan pedoman Bawaslu RI.

Kendala dalam Pembentukan Pengawas Dsa/Kelurahan

- a. Syarat usia dan pendidikan calon panwas kelurahan/desa
- b. Tidak ada yang mendaftar walaupun masa perpanjangan pendaftaran sudah dilakukan
- c. Pendaftar calon pengawas desa ada yang berstatus perangkat desa/pengurus BMD
- d. Jarak tempuh dari 1 desa dengan desa yang lain sangat jauh jika dibolehkan untuk mengambil calon panwas kelurahan/desa dari desa

terdekat contohnya di Kabupaten Padang Lawas, Padang Lawas Utara, dan Kabupaten Tapanuli Selatan. Bawaslu Provinsi Sumatera Utara telah menyurati Bawaslu RI sebagai langkah tindaklanjut dari masalah ini.

- Penguatan Kelembagaan Pengawas Pemilu
 - a. Membentuk sentra gakkumdu
 - b. Kerjasama dengan lembaga terkait misalnya Ombudsman RI, Komisi Penyiaran, dan Komisi Informasi

- Strategi Pengawasan
 - a. Pengawasan melekat di setiap tahapan
 - b. Himbauan ke berbagai instansi pemerintah, TNI/Polri terkait netralitas, serta himbauan kepada bakal pasangan calon, tim pemenangan maupun partai pengusung bakal pasangan calon terkait hal yang berpotensi terjadinya pelanggaran
 - c. Sampai saat ini sengketa yang terjadi di Kabupaten Dairi terkait pasangan calon yang ditolak pendaftarannya
 - d. Terdapat 2 daerah yang berpotensi calon tunggal yaitu Kabupaten Padang Lawas Utara dan Kabnupate Deli Serdang terkait pendaftaran 2 pasangan calon lewat perseorangan yang ditolak KPU Provinsi Sumatera Utara karena tidak memenuhi syarat.

- Data Pencalonan
 - Pemilihan Gubernur Provinsi Sumatera Utara
Perseorangan: tidak ada, parpol: 3 bakal pasangan calon
 - Pilkada di 8 kab/kota
Perserangan: 13 bakal pasangan calon
Parpol: 15 bakal pasangan calon

No.	Kabupaten/Kota	Perseorangan	Partai Politik
1.	Padang Sidempuan	2	2
2.	Padang Lawas Utara	-	1
3.	Batubara	1	3
4.	Padang Lawas	1	2
5.	Langkat	5	2
6.	Deli Serdang	2	1
7.	Tapanuli Utara	1	2
8.	Dairi	1	2

c. Pemaparan Ketua KPU Provinsi Sumatera Utara

1. Proses pencairan anggaran dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) KPU di Provinsi dan 8 Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara yang menyelenggarakan Pilkada, telah selesai dengan tepat waktu, sebagaimana rincian dalam bentuk matriks terlampir;
2. Terkait Pemutakhiran Data Pemilih :
Kendala proses pemutakhiran data pemilih, Upaya KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara untuk menghasilkan data pemilih yang valid, akurat dan terhindar dari mobilisasi petahana, kendala PPDP dalam proses pencocokan dan penelitian, pemilih pemula yang belum memiliki E-KTP, sistem kroscek data pemilih ganda/pemilih fiktif yang akan dilakukan oleh KPU untuk memastikan validitas daftar pemilih, dan hasil rekapitulasi daftar pemilih pada 8 Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemilihan Serentak Tahun 2018, kami inventarisasi dalam matriks terlampir.

NO	PROV/KAB/KOTA	TGL NPHD	NOMOR NPHD	ANGGARAN		KET
1	PROVINSI SUMATERA UTARA	31 Juli 2017	No. 270/6673/2017	Rp .	855.940.086.000	TA. 2017 : Rp. 327.366.912.233,-
			No.316/PP.01.3-SPj/12/Prov/VII/2017			TA. 2018 : Rp. 528.573.173.767,-
2	KABUPATEN DAIRI	8 Agustus 2017	No. 18 TAHUN 2017	Rp .	34.933.377.800	TA. 2017 : Rp. 10.580.243.000,-
			No. 272/PR.07-SPj/1211/KPU-Kab/VIII/2017			TA. 2018 : Rp. 24.353.134.800,-
3	KABUPATEN LANGKAT	24 Agustus 2017	No. 59/BUP/2017	Rp .	52.277.000.000	TA. 2017 : Rp. 12.389.353.100,-
			No. 321/KPU Kab.002.434722/VIII/2017			TA. 2018 : Rp. 39.887.646.900,-
4	KABUPATEN BATUBARA	23 Agustus 2017	No. 900/5303	Rp .	29.338.487.800	TA. 2017 : Rp. 5.000.000.000,-
			No. 01/PR.07-SPJ/1219/KPU-kab/VIII/2017			Nov 2017 : Rp. 3.146.338.000,- Jan 2018 : Rp. 21.192.149.800,-
5	KABUPATEN PADANG LAWAS	31 Juli 2017	No. 270/170/Mou/2017	Rp .	26.000.000.000	TA. 2017 : Rp. 6.165.767.500,-

			No. 024/PR.01- SPJ/1221/Kab/VII/20 17			TA. 2017 : Rp. 3.834.232.500,- TA. 2018 : Rp. 16.000.000.000,-
6	KABUPATEN TAPANULI UTARA	15 Agustus 2017	No. 139/NPHD/TU/VIII/2 017	Rp .	35.911.617.95 0	TA. 2017 : Rp. 10.841.667.300,-
			No. 251/PP.01.3- SPJ/1202/Kab/VIII/2 017			TA. 2018 : Rp. 25.069.950.650,-
7	KOTA PADANGSIDIMPUA N	18 Agustus 2017	No. 270/3675/2017	Rp .	13.557.547.80 0	Sept 2017 : Rp. 1.500.000.000,-
			No. 461/PP.01.3- SPJ/1277/KPU- Kota/VIII/2017			Des 2017 : Rp. 4.559.145.600,- Mar 2018 : Rp. 7.498.402.200,-
8	KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA	18 Agustus 2017	No. 270/89/Mou/2017	Rp .	35.410.569.89 3	TA. 2017 : Rp.8.036.588.00 0,-
			No. 10/PP.01.3- SPj/1220/KPU- Kab/VIII/2017			TA. 2018 : Rp. 27.373.981.893,-
9	KABUPATEN DELI SERDANG	31 Agustus 2017	No. 900/3135	Rp .	78.219.849.25 0	TA. 2017 : Rp. 17.520.246.800,-
			No.528/PP.01.3- SPj/1207/K1/VIII/201 7			Peb 2018 : Rp. 37.085.337.450,- TA. 2018 : Rp. 23.614.265.000,-

NO	PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH	JAWABAN
2.a	Kendala pada proses pemutakhiran data pemilih	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masih banyaknya warga Sumatera Utara yang belum melakukan perekaman KTP-EL, berdasarkan informasi dari Disdukcapil Provinsi Sumatera Utara masih terdapat kurang lebih 1.200.000 penduduk/warga Sumatera Utara yang belum melakukan perekaman KTP-EL, dan ini tentu saja berimbas pada tingkat partisipasi pemilih. 2. Masih ditemuinya pemilih yang sudah tidak memenuhi syarat menjadi pemilih yang memiliki hubungan dengan administrasi kependudukan seperti pemilih yang sudah meninggal dunia, pindah domisili masih terdaftar dalam DP4 (Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan) yang berpotensi menjadi sumber gugatan. 3. DP4 memiliki kendala terkait akurasi data yang diserahkan Kementerian Dalam Negeri melalui KPU RI, bagaimana agar warga yang belum melakukan perekaman e-KTP dapat melakukan perekaman agar DP4 menjadi akurat.
2.b	Bagaimana upaya KPU Provinsi/Kab dan Kota Sumatera Utara menjamin menghasilkan data pemilih yang valid, akurat dan terhindar dari mobilisasi petahana	<ol style="list-style-type: none"> 1. KPU Provinsi Sumatera Utara selalu berkoordinasi dengan stake holder terkait seperti Disdukcapil Provinsi Sumatera Utara, TNI/Polri, Dinas Kesehatan, Kemenkumham dan dinas/organisasi masyarakat lainnya yang memiliki kontribusi dalam proses pemutakhiran data pemilih guna meningkatkan kualitas data pemilih. Dalam beberapa kesempatan KPU Provinsi Sumatera Utara sudah menginisiasi kegiatan berupa Forum Koordinasi Data Pemilih Terintegrasi pada 11 Desember 2017 dan 11 Januari 2018 bersama stake holder terkait. 2. Mengikutsertakan <i>stake holder</i> terkait dalam susunan Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara tahun 2018. 3. KPU menyurati TNI Polri untuk memberikan data personel yang pensiun sehingga terakomodir menjadi pemilih, masih ditemuinya pemilih yang tidak punya KTP. Masih ada penduduk baru yang belum memiliki e-KTP. Jika ada penduduk yang belum melakukan perekaman e-KTP dicatat dalam form ACKWK. 4. Menekankan kepada PPDP untuk mendata pemilih sesuai dengan domisilinya berdasarkan Identitas diri (KTP-EL/KK) berdasarkan peraturan yang berlaku (UU No 10 Tahun 2016, PKPU 2 Tahun 2017) sehingga menutup celah adanya mobilisasi dari pihak-pihak tertentu dalam hal ini petahana. 5. KPU secara aktif melakukan pengawasan secara berjenjang terhadap kinerja PPDP dengan mekanisme pemeriksaan yang sudah ditetapkan.

		6. KPU memiliki kesulitan berkoordinasi dengan Disdukcapil Provinsi Sumatera Utara untuk mendapatkan data yang dibutuhkan untuk pelaksanaan pilkada serentak. Terdapat Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri untuk tidak memberikan data yang dibutuhkan tersebut.															
2.c	Kendala dalam proses coklit oleh PPDP	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memastikan status penduduk yang terganggu jiwanya untuk dapat dicoret dalam daftar pemilih, yang dibutuhkan adalah surat keterangan dari dokter. 2. Memastikan status penduduk yang dicabut hak pilihnya untuk dapat dicoret dalam daftar pemilih, yang dibutuhkan adalah putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap. 3. Memastikan status penduduk yang sudah berubah status dari TNI/Polri menjadi sipil maupun sebaliknya. 4. Melakukan coklit dilokasi seperti perkebunan, lapas, perumahan-perumahan mewah/apartemen. 5. masih ditemuinya pemilih yang tidak memiliki identitas diri meskipun tidak dalam jumlah yang signifikan. 															
2.d	Memastikan pemilih pemula terdata dalam daftar pemilih termasuk yang belum memiliki KTP-EL	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memastikan PPDP mencatat pemilih baru yang ditemui pada saat coklit serta sudah berumur 17 tahun/sudah kawin. 2. Berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil terkait dukungan data pemilih pemula dapat diakses untuk menjadi masukan/bahan dalam proses pemutakhiran data. 3. Bagi Pemilih yang belum memiliki KTP-EL sejauh ini KPU sudah menghimbau/mensosialisasikan agar penduduk yang belum memiliki KTP-EL dapat melakukan perekaman dan memiliki surat keterangan untuk didata dalam daftar pemilih. 4. Berdasarkan regulasi yang ada untuk pemilih yang tidak belum memiliki KTP-EL/surat keterangan, KPU akan berkoordinasi dengan Disdukcapil perihal status kependudukan yang bersangkutan, jika pemilih tersebut sudah merekam dan dipastikan ada didatabase Disdukcapil maka akan tetap dimasukkan dalam data pemilih namun bila tidak maka KPU akan mencoretnya dari DPT. 															
2.e	Memastikan data pemilih ganda/fiktif	Berdasarkan PKPU No 2 Tahun 2017 BAB V pasal 27 dalam menyusun data pemilih , DPS sampai DPT menggunakan sistem informasi data pemilih (Sidalih) yang juga sebagai pendukung kerja penyelenggara pemilihan dalam menyusun, mengkoordinasi, mengumumkan, memelihara data pemilih termasuk dalam memastikan kroscek data pemilih yang ganda/fiktif melalui sistem yang terintegrasi langsung dengan KPU RI															
2.f.		<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2"></th> <th colspan="3">DPT PEMILU TERAKHIR</th> </tr> <tr> <th rowspan="2">No</th> <th rowspan="2">KABUPATEN/KOTA</th> <th>LAKI-LAKI</th> <th>PEREMPUAN</th> <th>TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>A</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			DPT PEMILU TERAKHIR			No	KABUPATEN/KOTA	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	TOTAL		A			
		DPT PEMILU TERAKHIR															
No	KABUPATEN/KOTA	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	TOTAL													
			A														

Rekapitulasi daftar pemilih pada 8 kab/kota	1.	Batubara	146.43 5	146.476	292.911
	2.	Dairi	100.69 1	103.803	204.494
	3.	Deli Serdang	671.12 1	674.968	1.346.08 9
	4.	Langkat	358.15 1	355.866	714.017
	5.	Padang Lawas	78.697	80.276	158.973
	6.	Padang Lawas Utara	78.333	77.776	156.109
	7.	Padangsidempuan	69.595	75.119	114.714
	8.	Tapanuli Utara	102.30 6	107.742	210.048

NO	PERTANYAAN	JAWABAN
3.	Komisi II DPR RI meminta laporan lengkap pendaftaran dan penetapan pasangan calon, baik yang diusulkan oleh parpol atau gabungan parpol maupun yang melalui jalur perseorangan?	<p>Pendaftaran tim bakal pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara tahun 2018 dilaksanakan dari tanggal 8 s/d 10 Januari 2018. Adapun bakal pasangan calon yang datang mendaftar adalah sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pada tanggal 8 Januari 2018, pukul 11.23 WIB, bakal pasangan calon an. Edy Rahmayadi – Musa Rajekshah, yang diusung oleh gabungan partai politik : Partai Gerindra, PKS, PAN, Partai Golkar, Partai NasDem Partai Hanura dengan jumlah kursi 60 kursi. 2. Pada tanggal 9 dan 10 Januari 2018, pukul 12.44 WIB, bakal pasangan calon an. JR. Saragih – Ance, yang diusung oleh gabungan partai politik : Partai Demokrat, PKP Indonesia dan PKB dengan jumlah kursi 20 kursi. 3. Pada tanggal 10 Januari 2018, pukul : 16.19 WIB, Bakal Pasangan Calon an. Djarot Saiful Hidayat – Sihar PH. Sitorus yang diusung oleh gabungan partai politik : PDI Perjuangan dan PPP. <p>Dapat kami sampaikan bahwa bakal pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur dari jalur perseorangan sampai dengan ditutupnya penyerahan syarat dukungan yang dibuka dari tanggal 22 s/d 26 Nopember 2017 tidak ada yang datang menyerahkan syarat dukungan kepada KPU Provinsi Sumatera Utara, sehingga dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil</p>

		Gubernur Sumatera Utara tahun 2018 hanya diikuti oleh bakal pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang diusung oleh partai politik.
4.	Bagaimana KPU mengantisipasi semakin banyaknya calon tunggal dalam pilkada tahun 2018, mengingat saat ini ada 19 daerah yang mengikuti pilkada serentak memiliki calon tunggal ?	<p>Di dalam penyelenggaraan pilkada serentak tahun 2018 di Provinsi Sumatera Utara ada di 8 KPU kabupaten/kota yaitu : Kabupaten Deli Serdang, Batu Bara, Dairi, Langkat, Padang Lawas, Padang Lawas Utara, Tapanuli Utara dan Kota Padang Sidempuan. Adapun kabupaten yang mempunyai calon tunggal adalah Kabupaten Padang Lawas Utara yang hanya diikuti oleh bakal pasangan calon an. Andar Amin Harahap, S.STP, M.Si – H. Hariro Harahap, SE, M.Si.</p> <p>Untuk mengantisipasi banyaknya calon tunggal didalam pelaksanaan pilkada serentak tahun 2018 di Provinsi Sumatera Utara yaitu dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar dapat memanfaatkan jalur perseorangan dan memperpanjang waktu pendaftaran bagi kabupaten/kota yang hanya diikuti oleh satu bakal pasangan calon sampai ditutupnya masa pendaftaran.</p>
5.	Apa saja upaya yang akan dilakukan KPU Provinsi/Kabupaten/Kota Sumatera Utara sosialisasi pilkada untuk meningkatkan partisipasi pemilih ?	<p>Adapun langkah-langkah yang dilakukan oleh KPU Provinsi Sumatera Utara dalam rangka meningkatkan partisipasi pemilih dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara tahun 2018 adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peluncuran penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara tahun 2018. 2. Penerbitan Iklan di media massa 3. Simulasi pemungutan dan penghitungan suara 4. Sosialisasi pada kelompok marjinal, tokoh agama dan perempuan 5. Sosialisasi pada kelompok disabilitas 6. Sosialisasi pendidikan pemilih pada kelompok marjinal, tokoh agama dan perempuan dan disabilitas. 7. Kampanye 8. Sosialisasi tatap muka pada ormas dan LSM
6.	Bagaimana kesiapan KPU Provinsi/Kabupaten/Kota Sumatera Utara dalam	KPU Provinsi Sumatera Utara akan melakukan rapat koordinasi dengan tim kampanye bakal pasangan calon, Bawaslu Provinsi Sumatera Utara, Pihak Kepolisian, dan kepada Pemerintah

	mempersiapkan tahapan kampanye ?	Daerah untuk menentukan tempat dan waktu pemasangan alat peraga kampanye.
7.	Bagaimana kesiapan KPU Provinsi/Kabupaten/Kota Sumatera Utara untuk menjamin pemungutan dan penghitungan suara berjalan secara jujur, adil dan demokratis ?	KPU Provinsi Sumatera Utara akan melakukan hal-hal sebagai berikut : 1. Melakukan bimbingan teknis kepada PPK, PPS, KPPS dan PPDP agar mereka bekerja sesuai dengan peraturan yang berlaku. 2. Memberikan sanksi yang tegas kepada Penyelenggara yang terbukti melakukan pelanggaran. 3. Berkoordinasi dengan Bawaslu Provinsi Sumatera Utara dalam hal pengawasan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara.
8.	Sejauh mana koordinasi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Kepolisian, KPU, Bawaslu, dan Kejaksaan dalam mempersiapkan pelaksanaan pilkada serentak 27 Juni 2018 ?	KPU Provinsi Sumatera Utara selalu melakukan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Polda Sumatera Utara, Bawaslu Provinsi Sumatera Utara dan Kejaksaan dengan melakukan pertemuan rutin, coffee morning, dan rapat evaluasi perkembangan penyelenggaraan pilkada serentak tahun 2018.
9.	Bagaimana kesiapan logistik pilkada serentak (kotak suara, bilik suara, maupun surat suara)?	- Kebutuhan kotak suara dan bilik suara dalam pilkada serentak tahun 2018, KPU Provinsi Sumatera Utara telah menampung anggaran untuk memenuhi kekurangan kotak suara sebanyak 10.000 buah dan bilik suara sebanyak 10.000 buah. - Untuk saat ini surat suara Pemilihan Gubernur Provinsi Sumatera Utara tahun 2018 dianggarkan sejumlah 11.508.931 lembar, jumlah akhirnya akan disesuaikan berdasarkan penetapan DPT.

**DATA BADAN ADHOCK DAN JUMLAH TPS
DALAM PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2018 SE-SUMATERA UTARA**

NO	KABUPATE N/KOTA	Kecama tan	Kelurah an/Desa	Anggo ta PPK	Anggo ta PPS	TPS	PPDP	KETERANGAN
1.	Asahan	25	204	125	612	1,881	1,997	
2.	Batu Bara	7	151	35	453	1,050	1,050	
3.	Binjai	5	37	25	111	397	677	
4.	Dairi	15	169	75	507	680	782	
5.	Deli Serdang	22	394	110	1,182	3,371	5,286	
6.	Gunung Sitoli	6	101	30	303	259	345	
7.	Humbang Hansudutan	10	154	50	462	375	473	
8.	Karo	17	269	85	807	640	984	
9.	Labuhan Batu	9	98	45	294	1,001	1,016	
10.	Labuhan Batu Selatan	5	54	25	162	666	782	
11.	Labuhan Batu Utara	8	90	40	270	816	901	
12.	Langkat	23	277	115	831	1,861	2,677	
13.	Mandailing Natal	23	404	115	1,212	908	908	
14.	Medan	21	151	105	453	3,024	5,882	
15.	Nias	10	170	50	510	338	338	
16.	Nias Barat	8	105	40	315	209	243	
17.	Nias Selatan	35	461	175	1,383	740	904	
18.	Nias Utara	11	113	55	339	276	300	
19.	Padang Lawas	12	304	60	912	449	618	
20.	Padang Lawas Utara	12	388	60	1,164	618	710	
21.	Padang Sidempuan	6	79	30	237	524	524	
22.	Pakpak Bharat	8	52	40	156	109	109	
23.	Pematang Siantar	8	53	40	159	535	535	
24.	Samosir	9	134	45	402	322	357	
25.	Serdang Bedagai	17	243	85	729	1,443	1,637	
26.	Sibolga	4	17	20	51	184	185	


27.	Simalungun	31	413	155	1,239	1,685	1,685	
28.	Tanjung Balai	6	31	30	93	355	419	
29.	Tapanuli Selatan	14	248	70	744	691	808	
30.	Tapanuli Tengah	20	215	100	645	553	585	
31.	Tapanuli Utara	15	252	75	756	627	765	
32.	Tebing Tinggi	5	35	25	105	407	407	
33.	Toba Samosir	16	244	80	732	470	580	
	Total	443	6,110	2,215	18,330	27,464	35,469	

d. Pemaparan Kapolda Provinsi Sumatera Utara

Pada tahun 2018 Provinsi Sumatera Utara akan menyelenggarakan 9 pilkada terdiri dari 1 (satu) pemilihan gubernur, 1 (satu) pemilihan walikota dan 7 pemilihan bupati. Pilkada serentak tahun 2018 di Provinsi Sumatera Utara yang meliputi pemilihan kepala daerah Gubernur Sumatera Utara dan Kepala Daerah Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Langkat, Kabupaten Batubara, Kabupaten Padang Lawas Utara, Kabupaten Tapanuli Utara, Kabupaten Padang Lawas, Kabupaten Dairi dan Kota Padangsidempuan memiliki nilai politis yang tinggi baik antar partai politik maupun bursa pasangan calon yang diusung partai politik dikarenakan hasil yang diperoleh akan menentukan peluang pada pemilu 2019 yang juga mempengaruhi faktor psikologis menghadapi pemilu legislatif dan presiden tahun 2019 yang akan dilaksanakan secara serentak.

Tahapan Pilkada Provinsi Sumatera Utara akan dimulai pada bulan September 2017 dengan diawali perekrutan penyelenggara pemilihan bersifat ad hoc seperti Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS) Dan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP). Petugas ad hoc ini akan bekerja selama sembilan bulan hingga tahapan pemilihan kepala daerah 2018 selesai. Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Provinsi Sumatera Utara 2018 akan dilaksanakan secara serentak dengan pemilihan kepala daerah delapan kabupaten di Provinsi Sumatera Utara.

➤ Mapping Kerawanan Potensi Konflik Pilkada 2018



MAPPING KERAWANAN POTENSI KONFLIK PILKADA 2018

NO	POLRES	POTENSI KONFLIK	PIHAK YANG BERKONFLIK	PENYEBAB KONFLIK	DATA KONFLIK DIMASA LALU
1	2	3	4	5	6
1.	POLRESTA MEDAN	a. KISRUH ANTARA BAWASLU DENGAN 2 ORANG PANWASLIH YANG GAGAL DILANTIK.	BAWASLU SUMUT DENGAN 2 ORANG PANWASLIH YANG GAGAL DILANTIK	2 ORANG PANWASLIH PILGUESU, PILKADA BUPATI DAN WALKOTA TAHUN 2018 DAN PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR, DPD, DPRD SERTA PEMILU PRESIDEN TAHUN 2019 TIDAK DILANTIK, ASAL DARI KAS. SERGAI AN. HERU HERIANTO DAN KAS. PADANG LAWAS AN. ZAINAL ABIDIN HASISUAN KARENA TERINDIKASI BERTHUBUNGAN DENGAN PARTAI POLITIK.	
2	POLRESTA MEDAN	a. PERPECAHAN DALAM INTERNAL PARTAI PPP. b. DUALISME KEPEMIMPINAN.	PENGURUS DPW PPP SUMUT DAN DPC KAS / KOTA VS DPP PPP ROMAHURMUZI	DUKUNGAN YANG DIBERIKAN DPP PPP KEPADA PASANGAN CALON GUESU DAN WAGUESU 2018 - 2023 DJAROT - SIHAR YANG TELAH MELANGGAR AD/ART PARTAI. MENURUT AD/ART PARTAI MENYEBUTKAN TIDAK BOLEH PPP MENDUKUNG PASANGAN KEPALA DAERAH YANG TIDAK BERAGAMA ISLAM.	
3	POLRES LANGKAT	a. PERSAINGAN ANTAR SALON PILKADA SERENTAK 2018.	KETUA DPD PARTAI GOLKAR PROV. SUMUT AN. NGOGESA SITEPU DENGAN LAWAN POLITIK /	BEREDARNYA SELEBARAN GELAP : BERISI TULISAN DAN GAMBAR SALON GUESU PILKADA TAHUN 2018 DAN JUGA MERUPAKAN KETUA DPD PARTAI GOLKAR PROV. SUMUT AN. NGOGESA SITEPU, DALAM SELEBARAN BERISI TULISAN "NGOGESA SITEPU BAKAL CALON GUBERNUR YANG KORUPTOR DAN MASYARAKAT SEORANG LONTE SIMPANANNYA" YANG DISERTAI DENGAN GAMBAR PORNOGRAFI, BERIKUT TULISAN YANG DIMUAT DALAM SELEBARAN : a) WANITA SIMPANANNYA DISIMPAN DI HOTEL/APERTEMEN TRAVELLERS SUITE DAN DALAM MINGGU INI DIBERIKAN RUMAH DI BUKIT JOHOR MAS DAN PAJERO SPORT TERBARU.	



PROFESIONAL, MODERN DAN TERPERCAYA

17



NO	POLRES	POTENSI KONFLIK	PIHAK YANG BERKONFLIK	PENYEBAB KONFLIK	DATA KONFLIK DIMASA LALU
1	2	3	4	5	6
				<p>b) WANITA TERSEBUT DIBERI TABUNGAN SEBESAR 500 JUTA ODH NGOGESA DARI HASIL UANG SETORAN KEPALA SEKOLAH YANG DIMUTASI.</p> <p>c) BULAN JANUARI 2017 INI, WANITA SIMPANNYA DIBERANGKATKAN LIBURAN KE MOSCOW.</p> <p>d) NGOGESA DAN SARA MENYIMPAN UANG HASIL KORUPSI APID LANGKAT DI BANK OCBC SINGAPORE SEBESAR 100 MILYAR DAN MEMBELI APARTEMEN DI SENTOSA ISLAND SINGAPORE.</p> <p>e) NGOGESA BELI APARTEMEN DI ANTASARI JAKARTA SEBESAR 4 MILYAR, BELI APARTEMEN DI MOI SEBESAR 5 MILYAR, BELI APARTEMEN SETIA BUDI JAKARTA SEBESAR 6 MILYAR DAN SUDAH DP APARTEMEN ORCHAD DI BAYAM SEBESAR 2 MILYAR.</p>	
4	POLRES LANGKAT	<p>a. PERSAINGAN ANTAR SALON SUPAT LANGKAT H.RUDI HARTONO BANGUN DENGAN SALON SUPATI LANGKAT LAINNYA DALAM PILKADA SERENTAH 2018.</p> <p>b. MENEMPATKAN SALIHO BAIK KADA TIDAK SESUAI ZONASI</p>	BAIKAL CALON SUPATI LANGKAT PADA PELUKADA LANGKAT TAHUN 2018 H.RUDI HARTONO BANGUN DENGAN OTK	PENGRUSAHAN SALIHO H.RUDI HARTONO BANGUN ANGGOTA DPRD RI BAIKAL CALON SUPATI LANGKAT PADA PILKADA LANGKAT TAHUN 2018 UNTUK PERIODE 2018 -2023 DI DESA SUKA MULIA KEC. HINAI KAB LANGKAT OLEH ORANG TIDAK RENAL (OTK) DENGAN CARA MEMOTONG/GERGAJI TIANG BESI SALIHO SEHINGGA SALIHO TERSEBUT JATUH.	

PROFESIONAL, MODERN DAN TERPERCAYA



NO	POLRES	POTENSI KONFLIK	PIHAK YANG BERKONFLIK	PENYEBAB KONFLIK	DATA KONFLIK DIMASA LALU
1	2	3	4	5	6
5	POLRES LANGKAT	a. PERSABANGAN ANTAR SALON SUPATI LANGKAT TERSEBUT RENCANA PERANGNANGIN 50 DENGAN SALON SUPATI LANGKAT LAINNYA DALAM PILKADA SERENTAK 2018. b. MEMEMPATKAN SALHO SALON WADA TIDAK SESUAI ZONASI.	BAKAL CAIDN SUPATI LANGKAT PADA PILKADA LANGKAT TAHUN 2018 TERSEBUT RENCANA PERANGNANGIN 50 DENGAN OTK	PENGRUSAHAN SALHO TERSEBUT RENCANA PERANGNANGIN 50 KETUA DPRD KAB. LANGKAT BAKAL CAIDN SUPATI LANGKAT PILKADA LANGKAT TAHUN 2018 DI DESA SUKA MULIA KEC. HINAI KAB. LANGKAT OLEH ORANG TIDAK BENAL (OTK) DENGAN CARA MEMOTONG/GERGAJI TIANG BESI SALHO SEHINGGA SALHO TERSEBUT JATUH.	
6	POLRES LANGKAT	a. ADANYA INDIRAS KEBERPIHAKAN PENYELENGGARA PILKADA. b. TIDAK MENJAGA NETRALITAS PENYELENGGARA PILKADA.	KETUA PANWASLU KAB. LANGKAT DENGAN OTK	PEMSAKARAN TERHADAP MOBIL DINAS KETUA PANWASLU KAB. LANGKAT DI YAYASAN PENDIDIKAN AN-NUR TEPATNYA DI DUSUN 8 VII DESA STABAT LAMA KEC. WAMPU KAB. LANGKAT (RUMAH KETUA PANWASLU KAB. LANGKAT AN. AIDIL FITRI).	
7	POLRES LANGKAT	a. PEMANFAATAN FASILITAS NEGARA DALAM KEGIATAN PILKADA.	KPU KAB. LANGKAT DENGAN PASANGAN BAKAL CAIDN SUPATI DAN WAKIL SUPATI LANGKAT DARI JALUR PERBORONGAN INDEPENDEN AN. IRHAM, ST DAN AHMAD ZAINUR.	PENGGUNAAN PLAT DINAS POLRI PADA KENDERAAN TIM SUKSES SAIDIN PERBORONGAN DI KANTOR KPU KAB. LANGKAT SALAH SATU PESERTA PENDUKUNG TEAM SUKSES PASANGAN BAKAL CALON SUPATI DAN WAKIL SUPATI LANGKAT DARI JALUR PERBORONGAN INDEPENDEN AN. IRHAM, ST DAN AHMAD ZAINUR DIKETAHUI MENGGUNAKAN KENDARAAN MOBIL JENIS MITSUBISHI PAJERO SPORT DENGAN MENGGUNAKAN PLAT DINAS POLRI NO. POL : 75 - 11 DAN BERLAMBAKUN TRIBRATA YANG DIRMUDIKAN OLEH AN. RIYAN DERMAWAN, LAIK-LAKI, 25 TAHUN, ALAMAT TANJUNG SARI MEDAN.	



NO	POLRES	POTENSI KONFLIK	PIHAK YANG BERKONFLIK	PENYEBAB KONFLIK	DATA KONFLIK DIMASA LALU
1	2	3	4	5	6
8	POLRES LANGKAT DAN POLRES LABUHAN SATU.	a. PENYALAHGUNAAN WEWENANG PEJABAT PEMERINTAH DALAM KEGIATAN PILKADA.	BUPATI LANGKAT DAN BUPATI LABUHANSATU SELATAN DENGAN ASN (SEKRETARIAT) KPU KAB. LANGKAT DAN KPU KAB. LABUHANSATU SELATAN	BUPATI LANGKAT DAN BUPATI LABUHANSATU SELATAN MENARIK ASN (SEKRETARIAT) KPU KAB. LANGKAT DAN KPU KAB. LABUHANSATU SELATAN, SEHINGGA MENGANGGU JALANNYA TAHAPAN PILKADA SERENTAK TAHUN 2018 DI KAB. LANGKAT DAN PILGUBSU TAHUN 2018. KPU KAB. LANGKAT, KPU KAB. LABUHANSATU SELATAN SUDAH MENYURATI BUPATI AGAR MENUNDA PENARIKAN ASN TERSEBUT.	PASCA PUNGUT SUARA PEMILU KADA KAB. LABUHAN SATU TANGGAL 18 JUNI 2010 TERJADI KASUS PENCULIKAN TERHADAP 4 (EMPAT) ORANG PENDUKUNG PASANGAN CALON KADA / WAKADA NO 2 DR. TIGOR P. SIREGAR – SUHERY, KE 4 (EMPAT) KORBAN PENCULIKAN ADALAH SLAMET RIADY, JOKO SAPUTRA, LEGIMIN DAN BURHAN PELAKU PENCULIKAN DIDUGA KUAT DARI KELOMPOK PENDUKUNG PASANGAN CALON KADA / WAKADA NO URUT 1 (INCUMBENT) HT. MILWAN YANG KALAH DALAM PEMILU KADA LABUHAN SATU TAHUN 2010.
9	POLRES DAIRI	a. KURANG EFEKTIFNYA KINERJA KPU KAB. DAIRI.			a. PADA HARI JUMAT TANGGAL 4 OKTOBER 2013 SEBANYAK 300 (LIMA RATUS) MASSA PENDUKUNG PASANGAN CALON NOMOR 3 DAN NOMOR 4 MELAKUKAN UNJUK RASA KE KANTOR KPU KAB. DAIRI MENUNTUT PERTANGGUNG JAWABAN KPU TENTANG PERSALAHAN DPT YANG BERAKHIR ANARKIS MERUSAK KANTOR KPUD, DPRD KAB. DAIRI DAN 1 (SATU) UNIT MOBIL DINAS KPUD KAB. DAIRI JENIS TOYOTA SS 942I YZ (DISAKAR MASSA).



NO	POLRES	POTENSI KONFLIK	PIHAK YANG BERKONFLIK	PENYEBAB KONFLIK	DATA KONFLIK DIMASA LALU
1	2	3	4	5	6
					b. PADA HARI SELASA TANGGAL 8 OKTOBER 2013 PUKUL 12.30 WIB SEKITAR 200 (DUA RATUS) ORANG MENGATASNAMAKAN MANCUR (MASYARAKAT ANTI PEMILU KADA CURANG) MEMBAWA SELESARAN DAN SPANDUK BERTULISAN "KPU TERKESAN SENGAJA MEMPERKISRUH PERSOALAN YANG MENUNJUKKAN KETIDAK PROFESIONALAN, INETRALITAS, KETERTUTUPAN DAN JAUH DARI PRINSIP KEJURUAN UNTUK MEMENANGKAN KANDIDAT TERTENTU" MELAKUKAN UNJUK RASA KE KANTOR KPU MENUNTUT SUBARKAN ANGGOTA KPUD KAB. DAIRI DAN KPUD PROVINSI MENGAMBIL ALIH PELAKSANAAN TAHAPAN PELAKSANAAN PEMILU KADA KAB. DAIRI TAHUN 2013 YANG BERAKHIR ANARKIS, SELANJUTNYA MASSA MENEROBOS KANTOR KPUD DAIRI DAN MERAMPAS KOTAK SUARA YANG BERISIKAN SISA SURAT SUARA.
10	POLRES PAKPAK BARAT	a. KOSONGNYA KOMISIONARIS KPU PAKPAK BHARAT.		PUTUSAN ATAS KELIMA KOMISIONER KPU KAB. PAKPAK BHARAT DALAM KASUS DUGAAN TINDAK PIDANA KORUPSI DANA HISAH APBD PELAKSANAAN SOSIALISASI PEMILIHAN UMUM DPR RI, DPD, DPRD PROVINSI, DPRD KABUPATEN DAN PEMILIHAN PRESIDEN TAHUN 2014 OLEH KETUA MAJELIS HAKIM AN. SONTA MERAUKO SINAGA.	

PROFESIONAL, MODERN DAN TERPERCAYA

➤ Rawan Tapal Batas

- Konflik Batas Wilayah Provinsi

1. Kabupaten Tanah karo dengan kabupaten Aceh Tenggara
Pembangunan sarana prasarana Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara Provinsi Aceh yang diklaim berada di wilayah Kabupaten Tanah Karo Provinsi Sumatera Utara (pembangunan jalan dan kantor camat)
2. Kabupaten Labuhan Batu Selatan dengan Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau
Posisi patok batas wilayah saling klaim (Provinsi Sumatera Utara berpedoman pada Keputusan Mendagri No. 185.5-194 dan Provinsi Riau berpedoman kepada Kesepakatan Tim Penentuan Batas Daerah)
3. Kabupaten Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara dengan Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau
Sengketa masyarakat Kecamatan Hutatinggi Kabupaten Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara dengan masyarakat Desa Batang Kumuh Kecamatan Pasir

Pangaraian Kabupaten Rokan Hulu di areal perkebunan dan Provinsi Riau berpedoman pada titik patok P59,P58.

4. Kabupaten Madina Provinsi Sumatera Utara dengan Kabupaten Pasaman Provinsi Sumatera Barat.

Terkait pembangunan pos polisi Polsek Muara Sipongi Polda Sumatera Utara diklaim memasuki wilayah Provinsi Sumatera Barat.

- Konflik Batas Wilayah Daerah Administrasi di Sumatera Utara
 1. Kabupaten Simalungun-Kabupaten Tanah Karo
Terkait pendirian pilar/tapal batas di 6 desa antara kabupaten telah berpindah tempat ke arah Kabupaten Tanah Karo (belum ada verifikasi).
 2. Kotamadya Sibolga-Kabupaten Tapanuli Tengah
Terkait titik koordinat tapal batas wilayah administrasi antara kabupaten dan kotamadya (masih dilakukan rapat koordinasi dan belum ada verifikasi).

➤ Rawan Bencana Alam

WILAYAH	BANJIR
TAPTENG	DEK SERAHAR, DESA KAMPUNG MUDIK, DESA DEK DAWA, KEL. PASAR BARU, DESA PASAR TARANDAN KEC. BARUS.
MADINA	DESA GUNUNG TUA KEC. PENYABUNGAN, KEC. PENYABUNGAN KOTA, KEC. SIAGUN DAN KEC. BUKIT MELITANG
TAPSEL	DESA GARONGGANG, DESA SEMARONOP, DESA ROJITAN KEC. ANGIOLA SELATAN, DESA MUARA HUTARAJA KEC. MUARA BATANG TORU.
NIAS	DEK HILIBETO IDANOI DGN II, DEK TETITHOGE DEK LELEANKA IDANOI, DEK SIALUBANUA KEC. KEC. GUSTI IDANOI KAB. NIAS
NIAS BARAT	DESA ONOWAMBEO, BAWADAGE KEC. MANDERENE.
MEDAN	KELURAHAN MAHMUN, ALUR, JATI, HAMDAN, SUKARAJA DAN KAMPUNG BARU. KELURAHAN SUNGAI MATI KEC. MEDAN MAHMUN.
D. SERDANG	SUNGAI LAU MENTAR DESA DUREN SERUGUN KECAMATAN SIBOLANGIT
LAB. BATU	PERKAWAN DEK NABARA, SUNGAI JANZI KECAMATAN SELAH BARAT, JL. TARUNA 45 LING. TERMINAL KEL. PADANG BULAN KEC. RANTAU UTARA, JL. LINTAS SUMATERA DUSUN KAMPUNG SONAH
LABUSEL	DESA UJUNG GADING KEL. LANGGA PAYUNG, DESA SISUMUT, AGAM JAWA DAN TANJUNG MULIA, DESA MAMPANG KEC. KOTA PINANG.
SERGEI	KECAMATAN SEI RANPAH, DOLOK MANGHUL, SAI BANGSAN, TANJUNG BERINGIN, PERBAUNGAN DAN KEC. TELUK MENGGUDU.
T. TINGGI	KEL. PERSEMANG, MANDALING DAN BEOHOL, KELURAHAN PERSEMANG, TUALANG, BANDAR SONO, MANDALING, PASAR BARU DAN BANDAR UTARA.
WILAYAH	TANAH LONGSOR
T. KARO	KEC. BARUS JAHNE, DEK. DOULU KEC. SERAGATI
P. BARAT	DEK. JAMBURA KEC. SEMPAT RUSE, JL. LINTAS SUMATERA DGN BULUH DEDI, DUSUN LAU MENTAR, DEK. TANJUNG MULIA KEC. SITU JAHNE
DAIRI	DUSUN SERABI DESA LINGGA RAJA II KECAMATAN PEGAGAN HILIR, LAU PONDON
TAPUT	JL. LINTAS SUMATERA MEDAN-TARUTUNG KM. 16, JL. LINTAS TARUTUNG - SIBORONG-BORONG DESA PASAR BATU KEC. SIPAHOLON, JL. TARUTUNG - SIBORONG-BORONG DESA PASAR BATU KEC. SIPAHOLON
TAPTENG	JL. SIBOLGA - TARUTUNG KM. 16, DUSUN SIBURA-BURA DESA TAPAN NAULI I KEC. TAPAN NAULI, JALAN SIBOLGA - TARUTUNG KM. 16-18 DAN KM. 07, JALAN SIBOLGA - TARUTUNG KM. 6 KEC. SITAHUIS
MADINA	JL. LINTAS KELURAHAN TANO BATO KEC. PENYABUNGAN SELATAN

PROFESIONAL, MODERN DAN TERPERCAYA

➤ Radikalisme dan Terorisme

1. Pada tanggal 28 Agustus 2016 pkl 08.30 wib terjadi percobaan aksi teror dan dilanjutkan penganiayaan di gereja khatolik stasi Santo Yosep di Jalan dr. Mansyur No. 75 Medan yang dilakukan oleh Ivan Armadi Hasugian, alamat di Jalan Setia Budi No. 26 Medan.

2. Pada tanggal 21 Desember 2016 di rumah an. Herman Lubis Jalan Deli Tua Dusun 3 Aji Baho Kecamatan Sibirubiru Kabupaten Deli Serdang telah diamankan (upaya paksa) terhadap DPO kss tindak pidana terorisme an. Syafii (jaringan Pok Katibah Gonggong Rebus (KGR) pimpinan an. Gigih Rahmat Dewa)
3. Pada tanggal 6 s/d 7 Juni 2017 penangkapan 3 orang terduga teroris (Reja, Jhon Heri dan Azzam Algozhi alias Abu Yakub) oleh Densus 88 di Medan.
4. Pada tanggal 25 Juni 2017 terjadi aksi teror/penyerangan terhadap petugas jaga Mako Mapolda Sumatera Utara oleh 2 orang Pok Ansharut Daulah terinspirasi Pok Jad maupun ISIS → 1 orang personel PolriMedan an. Ipda Anumerta M. Sigalingging. Pelaku 2 orang dilumpuhkan Brimob (1 orang pelaku Medan an. Ardi dan 1 orang luka tembak an. Syawaluddin Pakpahan)

➤ Rencana Operasi Mantap Praja Toba 2018





DATA REKAPITULASI POLDA SUMUT

NO	SATKER/POLRES	KUAT LIBAT PERSONIL					
		POLRI	2/3	1/2	1/3	1/5	1/6
1	POLDA SUMUT	3.320	2.213	1.660	1.107	664	553
2	POLRESTABES MEDAN	1479	986	740	493	296	247
3	POLRES PEL. BELAWAN	401	267	201	134	80	67
4	POLRES BINJAI	439	293	220	146	88	73
5	POLRES LANGKAT	578	385	289	193	116	96
6	POLRES TANAH KARO	379	253	190	126	76	63
7	POLRES DELI SERDANG	715	477	358	238	143	119
8	POLRES SERGAI	325	217	163	108	65	54
9	POLRES TEBING TINGGI	379	253	190	126	76	63
10	POLRES ASAHAN	440	293	220	147	88	73
11	POLRES BATU BARA	265	177	133	88	53	44
12	POLRES TANJUNG BALAI	221	147	111	74	44	37
13	POLRES LABUHAN BATU	408	272	204	136	82	68
14	POLRES SIMALUNGUN	570	380	285	190	114	95
15	POLRES P. SIANTAR	289	193	145	96	58	48
16	POLRES SIBOLGA	146	97	73	49	29	24
17	POLRES P. SIDIMPUAN	177	118	89	59	35	30
18	POLRES TAPTENG	236	157	118	79	47	39
19	POLRES TAPSEL	394	263	197	131	79	66
20	POLRES MADINA	286	191	143	95	57	48
21	POLRES TOBASA	195	130	98	65	39	33
22	POLRES SAMOSIR	151	101	76	50	30	25
23	POLRES HUMBAGAS	179	119	90	60	36	30
24	POLRES TAPUT	275	183	138	92	55	46
25	POLRES DAIRI	245	163	123	82	49	41
26	POLRES PAKPAK BHARAT	145	97	73	48	29	24
27	POLRES NIAS	326	217	163	109	65	54
28	POLRES NIAS SELATAN	209	139	105	70	42	35
	TOTAL	13.170	8.780	6.585	4.390	2.634	2.195



PROFESIONAL, MODERN DAN TERPERCAYA

29



PERLIBATAN PERS TNI BACKUP POLDA

NOMOR URUT	SATUAN	KEHATI-HATI	PAGIHAN ROBERT	SATUAN	CADANGAN	NET	
							1
1. WILAYAH KODEM 022/PT							
1	KODEM 0202 / LKT	140 ORG	40 ORG 50 ORG 50 ORG	KODEM 0202 / LY YONARHANJUDGE 11/WRY YONIF R.100 / PS	253 ORG (YONARHANJUDGE 11/WRY) 100 ORG (KODEM 0202 / LKT) 253 ORG (YONIF R.100 / PS)	POLRES LANGKAT DAN POLRES BINJAI	
2	KODEM 0204 / DG	100 ORG	25 ORG 65 ORG	KODEM 0204 / DG YONIF 121 / MK	250 ORG (YONIF 121 / MK) 120 ORG (KODEM 0204 / DG)	POLRES DELI SERDANG, POLRES SERGAI DAN POLRES T. TINGGI	
3	KODEM 0207 / SML	80 ORG	25 ORG 45 ORG	KODEM 0207 / SML YONIF 122 / TS	213 ORG (YONIF 122 / TS) 213 ORG (KODEM 0207 / SML)	POLRES SIMALUNGUN DAN POLRES P. SIANTAR	
4	KODEM 0208 / AG	80 ORG	25 ORG 45 ORG	KODEM 0208 / AG YONIF 126 / KC	100 ORG (YONIF 126 / KC) 120 ORG (KODEM 0208 / AG)	POLRES BATUBARA DAN POLRES ASAHAN	
5	KODEM 0209 / LB	100 ORG	50 ORG 50 ORG	KODEM 0209 / LB YONIF 126 / KC	200 ORG (YONIF 126 / KC) 120 ORG (KODEM 0209 / LB)	POLRES TANJUNG BALAI DAN POLRES LABUHAN BATU	
2. WILAYAH KODEM 022/NS							
1	KODEM 0205 / TK	50 ORG	25 ORG 25 ORG	KODEM 0205 / TK YONIF 125 / SML	125 ORG (YONIF 125 / SML) 100 ORG (KODEM 0205 / TK)	POLRES TANAH KARO	
2	KODEM 0206 / DR	110 ORG	50 ORG 60 ORG	KODEM 0206 / DR YONIF 125 / SML	188 ORG (YONIF 125 / SML) 100 ORG (KODEM 0206 / DR)	POLRES DAIRI DAN POLRES PAKPAK BHARAT	
3	KODEM 0210 / TU	155 ORG	80 ORG 25 ORG 50 ORG	KODEM 0210 / TU YONIF 122 / RW YONIF 125 / SML	50 ORG (YONIF 122 / RW) 120 ORG (KODEM 0210 / TU)	POLRES TOBASA, TAPUT, HUMBAGAS DAN SAMOSIR	
4	KODEM 0211 / TT	80 ORG	80 ORG	KODEM 0211 / TT	50 ORG (KODEM 0211 / TT)	POLRES SIBOLGA DAN POLRES TAPTENG	
5	KODEM 0212 / TS	125 ORG	80 ORG 55 ORG	KODEM 0212 / TS YONIF 123 / RW	56 ORG (YONIF 123 / RW) 210 ORG (KODEM 0212 / TS)	POLRES TAPSEL DAN POLRES P. SIDIMPUAN	
6	KODEM 0213 / NIAS	60 ORG	60 ORG	KODEM 0213 / NIAS	100 ORG (KODEM 0213 / NIAS)	POLRES NIAS DAN POLRES NIAS SELATAN	



PROFESIONAL, MODERN DAN TERPERCAYA

30



1	2	3	4	5	6	7	8
2. WILAYAH MEDAN KOTA							
1	KODIM 0201 / BS	112 ORG	52 ORG 20 ORG 20 ORG 20 ORG	KODIM 0201 / BS YONKAW 6 / NK YONARMED 2 / 105 YONZEPUR 1 / DD	150 ORG (KODIM 0201 / BS) 250 ORG (YONARMED 2 / 105) 250 ORG (YONKAW 6 / NK) 190 ORG (YONZEPUR 1 / DD)		POLRESTABES MEDAN
2	KODSMAWUDNAS III	50 ORG	50 ORG	KODSMAWUDNAS III			POLRESTABES MEDAN
3	LANTANAL I / SELAWAN	100 ORG	100 ORG	LANTANAL I / SELAWAN			POLRESTABES MEDAN DAN POLRES PELABUHAN SELAWAN
4	LANUD SOEWONDO	100 ORG	100 ORG	LANUD SOEWONDO			POLRESTABES MEDAN
5	WING 2 PADIKAS	50 ORG	50 ORG	WING 2 PADIKAS			POLRESTABES MEDAN
6	YONMARHARLAN	50 ORG	50 ORG	YONMARHARLAN			POLRESTABES MEDAN
4. POSMO							
1	WILAYAH KOREM 022 / PT KODIM 0202 / LKT KODIM 0204 / DG KODIM 0207 / SML KODIM 0208 / AG KODIM 0209 / LB				15 ORG (YONARHAWUDG 11 / WSW) 15 ORG (YONIF 121 / NB) 15 ORG (YONIF 122 / TD) 15 ORG (YONIF 126 / MC) 15 ORG (YONIF 126 / MC)		
2	WILAYAH KOREM 023 / NS KODIM 0205 / TK KODIM 0206 / DR KODIM 0210 / TU KODIM 0211 / TT KODIM 0212 / TS KODIM 0213 / NSAS				15 ORG (YONIF 125 / SBR) 15 ORG (YONIF 125 / SBR) 15 ORG (YONIF 125 / SBR) 15 ORG (KODIM 0211 / TT) 15 ORG (YONIF 123 / RW) 15 ORG (KODIM 0213 / NSAS)		
3	WILAYAH MEDAN KOTA KODIM 0201 / BS				15 ORG YONKAW 6 / NK		
Jumlah		1552 ORG	1552 ORG		441 ORG		
		TOTAL				5993 ORG	

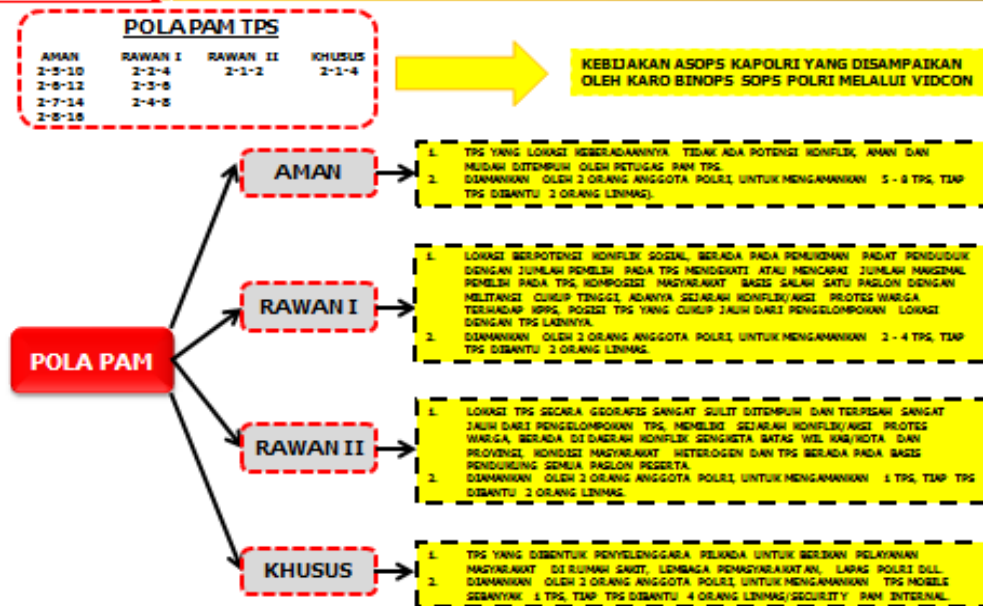


PROFESIONAL, MODERN DAN TERPERCAYA

31



POLA PAM TPS



PROFESIONAL, MODERN DAN TERPERCAYA

32



DUKGAR PILGUBSU & PILKADA 8 KAB/KOTA 2018

NO	PROV/KAB/KOTA	SATWIL	PENGAJUAN		NPHD
			AJUAN	DISETUJUI	
1	PILKADA GUBSU	SEJAJARAN POLDA SUMUT	315.733.581.000	130.472.846.500	SDH DISETUJUI TAPD PROV. SUMUT
2	PILKADA DELI SERDANG	POLRESTABES MEDAN	13.276.750.000	7.496.000.000	SDH
		POLRES BELAWAN	1.076.450.000	830.000.000	SDH
		POLRES DELI SERDANG	7.441.435.100	5.180.395.000	SDH
		POLRES BINJAI	390.380.000	235.869.000	SDH
3	PILKADA LANGKAT	POLRES BINJAI	1.105.121.000	800.000.000	SDH
		POLRES LANGKAT	8.545.526.500	4.500.000.000	SDH
4	PILKADA DAIRI	POLRES DAIRI	8.208.779.000	5.500.000.000	SDH
5	PILKADA BATU BARA	POLRES BATU BARA	6.768.836.875	4.768.836.875	SDH
6	PILKADA TAPUT	POLRES TAPUT	10.760.615.100	6.000.000.000	SDH
7	PILKADA PALAS	POLRES TAPSEL	5.296.334.413	4.024.093.490	SDH
8	PILKADA PALUTA	POLRES TAPSEL	5.296.334.413	4.030.000.000	SDH
9	PILKADA P.SIDEMPUAN	POLRES PSP	12.000.000.000	7.500.000.000	SDH DISETUJUI TAPD KOTA P. SIDEMPUAN
JUMLAH			395.900.143.401	181.338.040.865	45,8 %



PROFESIONAL, MODERN DAN TERPERCAYA

39

➤ Perkiraan Potensi Konflik Pilkada 2018

- Dimungkinkan akan terjadi persaingan ketat dalam memperebutkan dukungan dari partai pengusung baik di kepengurusan daerah Provinsi Sumatera Utara maupun tingkat pusat
- Para bakal calon yang berkeinginan mendaftar dari jalur perseorangan akan berusaha mengumpulkan copy KTP sesuai dengan jumlah yang diperlukan dan pada prosesnya dimungkinkan akan terjadi upaya money politik (membayar sejumlah uang untuk mendapatkan copy KTP)
- Keberadaan dualisme kepemimpinan pada DPP PKP Indonesia Sumatera Utara versi Haris Sudarno dan versi Hendro Priyono sangat berpotensi memunculkan permasalahan internal partai
- Tidak validnya DPT akan menimbulkan permasalahan ketika pasca pungut suara, sehingga calon yang kalah akan berupaya untuk menggagalkan pilkada
- Salah satu calon tidak direkomendasikan parpol yang mengusung sehingga simpatisan melakukan unjuk rasa
- Terjadi black campaign
- Jadwal kampanye bersamaan
- Terlambatnya jadwal percetakan sehingga mengakibatkan terlambatnya distribusi
- Pada masa tenang diperkirakan rentan terjadi money politik

- j. Menggunakan hak suara pemilih melbihi 1 (satu) kali
- k. Tahap rekapitulasi banyaknya saksi yang protes hasil pemilihan.
- l. Masalah batas wilayah yang belum diselesaikan

➤ Upaya yang Dilakukan

- a. Mapping pendataan permasalahan konflik di 8 kab/kota dan umumnya Provinsi Sumatera Utara pada pelaksanaan pilkada.
- b. Mencari solusi terkait batas wilayah yang akan menimbulkan konflik pada pelaksanaan pilkada termasuk pemilih siluman.
- c. Sebagai antisipasi, Polda Sumatera Utara telah membuat permintaan bantuan personil pengamanan ke Polda Aceh jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan/kontijensi pada pelaksanaan tahapann–tahapann pilkada.
- d. Polda Sumatera Utara juga melibatkan satuan TNI sebanyak 2/3 dari jumlah Polri pertahapan, dimana pelibatanTNI dimulai dari tahapan penetapan paslon dan pengundian nomor urut.
- e. Menyusun rencana latihan pra operasi dan rencana kontijensi.
- f. Melakukan rakor dengan KPU , Bawaslu, dan instansi terkait lainnya terkait permasalahan serta mencari solusi pada pelaksanaan pilkada
- g. Menyiapkan dan menggelar personil pengamanan.
- h. Polisi sahabat warga → dekat dan senang bertemu masyarakat, turun lapangan, giat bersama, bina asas kekeluargaan, selesaikan masalah-masalah sosial
- i. Ikut mensukseskan pilkada 2018 (1 propinsi dan 7 kab/kota)
- j. Meningkatkan fungsi dan peran forum 3 pilar plus (Babinsa, Bhabinkamtibmas dan lurah/kades/tokoh masyarakat) → optimalkan sinergitas dan kinerja
- k. Giat penanggulangan terorisme, pok radikal pro kekerasan dan intoleransi → lidik pangal & gakkum
- l. Pemberdayaan tim terpadu penanggulangan konflik sosial → identifikasi, pemetaan (mapping), forum komunikasi, libatkan stakeholders/kemitraan dan antar instansi, tentukan pola kerjasama/SOP

- m. Melaksanakan coffee morning pemangku kepentingan pilkada serentak 2018 pada tanggal 15 Desember 2017 di Hotel Santika di Medan.
- n. Dalam pelaksanaan Operasi Mantap Praja Toba 2018, Polda Sumatera Utara telah membuat jukrah ke jajaran untuk melaksanakan patroli dialogis/persambangan guna menciptakan situasi kamtibmas yang kondusif pada pelaksanaan pilkada serentak tahun 2018 di wilayah Provinsi Sumatera Utara.
- o. Untuk tahapan pendaftaran paslon, rikkes dan verifikasi data paslon Polda Sumatera Utara telah melaksanakan pengamanan di kantor KPU dan Bawaslu, serta pengamanan melekat kepada paslon yang sudah mendaftar, Ketua KPU dan Komisioner KPU juga dilakukan pengamanan di kediaman Ketua KPU dan Ketua Bawaslu.
- p. Sebanyak \pm 1,3 juta (17 %) dari jumlah pemilih yang sudah mempunyai hak pilih tetapi belum terekam dalam e-KTP /surat keterangan.

III. HAL-HAL YANG DISAMPAIKAN ANGGOTA KOMISI II DPR RI

1. Netralitas Aparatur Sipil Negara harus terus dijaga, termasuk di dalamnya para kepala desa yang harus dapat menjaga diri agar tidak terlibat dalam kampanye atau melakukan pelanggaran lainnya dalam proses pelaksanaan pilkada serentak 2018.
2. Antisipasi dini dan penindakan yang tegas terhadap adanya isu SARA dan politik identitas yang mungkin terjadi di Provinsi Sumatera Utara. Jangan sampai kasus yang terjadi saat pilkada di Provinsi DKI Jakarta terjadi pula di Provinsi Sumatera Utara.
3. Perekaman e-KTP harus dapat dipastikan telah dilakukan oleh seluruh penduduk di Provinsi Sumatera Utara agar dapat menggunakan hak pilihnya dalam pilkada serentak pada 27 Juni 2018.

IV. PENUTUP

Demikian laporan hasil kunjungan kerja Komisi II DPR RI di Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 22 Januari 2018. Semoga dapat ditindaklanjuti dan bermanfaat bagi semua pihak. Kepada semua pihak yang membantu terselenggaranya kunjungan spesifik ini, kami ucapkan terima kasih.

